

**Sri Heriyani. NPM. 16.12.0078.** Peran Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa (studi kasus Desa Bulurejo Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu).

**Latar belakang** penelitian ini dilakukan, karena betapa pentingnya BPB dalam ikut menyelenggarakan pemerintahan Desa, tepatnya Di Desa Bulurejo Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu.

**Tujuan penelitian** ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Ikut Menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

**Manfaat penelitian** diharapkan berguna untuk mengembangkan konsep-konsep maupun teori yang berkaitan dengan kinerja aparatur Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa.

**Metode penelitian** ini menggunakan metode penelitian deskriptif-korelational. Artinya peneliti berusaha menggambarkan dan kemudian mencoba menghubungkan adanya kaitan antara kinerja aparatur Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

**Kesimpulan Hasil penelitian** menemukan bukti bahwa kinerja badan permusyawaratan Desa merupakan suatu Badan yang dianggap penting sekali Di Desa, karena Badan ini ikut dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, hal ini ditunjang dari analisis data yang menunjukkan bahwa, BPD dapat me Responsivitas kemampuan anggotanya terhadap masalah yang dihadapi serta kepentingan pihak yang diwakili, dengan menanggapi aspirasi dan kepentingan yang berkembang dalam masyarakat serta dalam melakukan pelayanan publik; BPD dapat memberikan Produktivitas, artinya dapat meningkatkan pelayanan pemerintah desa dalam usaha meningkatkan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat; BPD dapat memberikan Efektivitas kerja, artinya dapat mengemban tugas pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kata Kunci : Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi Daerah juga diharapkan memberi peluang peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara luas dalam konteks demokrasi. Untuk mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat yang terus berkembang serta menghadapi perkembangan yang terjadi baik dalam lingkungan Nasional maupun Internasional yang secara langsung akan berpengaruh terhadap roda atau pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di negara kita, maka untuk menjawab dan menghadapi tantangan dan

sekaligus peluang diperlukan adanya pemerintahan daerah yang tangguh yang di dukung oleh sistem dan mekanisme kerja yang professional dalam berbagai tingkatan sampai dengan tingkat Pemerintahan Desa.

Otonomi Daerah akan terus digalakkan seiring perkembangan dan tuntutan daerah yang semakin mandiri untuk dapat mewadahi dan memberikan respon secara aktif terhadap kebutuhan, kehendak dan aspirasi demi kepentingan masyarakat. Pemerintahan Desa apabila dikaitkan dengan hakekat Otonomi Daerah adalah efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa tersebut, yang ujungnya bermuara pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang diharapkan semakin lama semakin baik.

Hal tersebut sesuai pula dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang menghendaki adanya suatu perubahan dan peningkatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan dalam pelaksanaannya diharapkan<sup>1</sup> diciptakan suatu sistem pemerintahan desa yang sederhana, berwibawa dan mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta dapat terselenggaranya kegiatan administrasi yang efektif dan efisien.

Pengembangan dan pembangunan Otonomi Daerah tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang di daerah khususnya maupun Nasional pada umumnya.

Sistem struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat diarahkan untuk dapat menciptakan “Pemerintah yang demokratis dan peka” terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi. Posisi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah

Pemerintah Desa. Sedangkan dari segi pengembangan peran serta masyarakat, maka Pemerintah Desa selaku pembina pengayom dan pelayan kepada masyarakat sangat berperan dalam menunjang mudahnya masyarakat digerakkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pada dasarnya kekuatan otoritas desa terletak pada musyawarah rakyat dan didukung oleh aturan main yang telah dipahami dan disepakati bersama. Selain itu masyarakat desa sudah waktunya menyadari akan kepentingan yang mendasar untuk bisa bertahan di dalam masyarakat pada lingkup pedesaan.

Hal ini dimaksudkan agar desa makin terbuka (dapat berhubungan dengan desa atau daerah lain) tidak dikatakan sebagai daerah terpencil namun berkembang serta dapat menjamin ketahanan masyarakatnya disegala bidang. Kepentingan warga desa harus diterjemahkan kedalam aspirasi yang harus disalurkan secara obyektif yang dilandasi rasa kebersamaan dan sesuai realitas yang ada.

Pada masa Pemerintahan Orde Baru, kekuatan otoritas desa saat itu sangat semu. Hegemoni kekuatan politik menyebabkan Pemerintah Desa sulit untuk menemukan otonomitas sejatinya. "Secara struktur Ketua Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dirangkap oleh Kepala Desa", (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Bagaimana mungkin aspirasi murni warga desa tersalurkan dengan bebas dan aktif, kalau pimpinannya adalah Kepala Pemerintahan setempat. Sebab Kades selaku pimpinan di desa nyata-nyata tidak bisa menghindar dari aturan main atau perintah lembaga di atasnya, yaitu Camat dan Bupati. Disisi lain aspirasi warga desa seringkali bersikap kontradiktif dengan kebijaksanaan yang berasal dari luar desa.

Oleh karena itu semua program desa wajib mengacu pada kebijakan "*Top Down*", mengingat semua program pembangunan terfokus atau bermuara ke desa tetapi arahnya tetap dihadapkan kepada kepentingan otoritas politik pemerintahan secara Nasional. Maka bisa dibuktikan pada setiap lomba desa, tak heran yang keluar sebagai pemenang adalah desa yang sudah direkayasa oleh pengaruh otoritas politik. Gambaran kesemuan Otonomi Daerah itu jelas oleh karena terkontaminasi oleh paradigma "pokoknya" sesuai kebijakan "*Top Down*" (tuntas : tuntunan dari atas). Dibelakang layar rakyat begitu tertekan oleh kerja keras tetapi manfaatnya tidak begitu dirasakan. Kalau desa itu makmur berarti kebijakan "*Top Down*" berhasil dengan sukses, maka secara politis sangat menguntungkan pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat akan menjadi populer dengan sistem sentralistiknya pada masa pemerintahan Orde Baru tersebut.

Pihak Lembaga Musyawarah Desa untuk selanjutnya disingkat LMD yang anggota-anggotanya sebagian besar adalah tokoh masyarakat yang dirujuk atas rekomendasi desa sudah barang tentu bersikap setuju saja atas kebijakan Kepala Desa. LMD yang seharusnya dapat menjadi "Wadah penyalur aspirasi masyarakat desa" dan sekaligus sebagai kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan desa justru menjadi alat untuk memperkuat kekuasaan Kepala Desa, terutama dalam hal proses pembuatan keputusan desa yang terkadang lebih banyak merupakan usul dan keinginan dari Kepala Desa. Kalau ada aspirasi warga desa yang muncul dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah desa, sulit terakomodasi apalagi tersalurkan. Seterusnya bila terjadi pembangkangan, maka melalui otoritas Kepala Desa pembangkangan tersebut otomatis dikucilkan dari kehidupan desa.

Hal ini disebabkan karena struktur kelembagaan dari Lembaga Musyawarah Desa yang memungkinkan terjadi monopoli kekuasaan Kepala Desa, dimana berdasarkan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa menyebutkan bahwa "Kepala Desa karena jabatannya adalah juga sebagai Ketua LMD". Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Desa telah mengatur susunan organisasi. Pemerintah Desa yang memisahkan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dari Kepala Desa, sehingga yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dalam kedudukan sebagai kepala pemerintahan bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya singkat BPD. Katakanlah BPD adalah "DPRD"-nya desa dan sebagai wahana yang sangat diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai harapan rakyat.

BPD dituntut untuk mampu bekerja secara professional dengan mengutamakan kepentingan masyarakat umum dan mampu membaca perkembangan yang ada dalam masyarakat desanya. Dengan terbentuknya BPD diharapkan proses demokrasi di desa dapat terlaksana dengan baik dan memiliki komitmen tinggi terhadap kepentingan lokal desanya dan benar-benar independen serta mampu merealisasikannya secara komprehensif dan masyarakatnya mampu bangkit dari keterbelakangan.

BPD sebagai lembaga legislatif desa yang memiliki usia masih sangat muda telah mengalami banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam menunjukkan eksistensi dari peran yang harus digalakkan sesuai dengan tuntutan era reformasi dan desentralistik. Dari permasalahan ini yang menjadi perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : "Peran Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Ikut Mengelenggarakan Pemerintahan Desa (kasus Di Desa Bulurejo Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu)".

## **B. Perumusan Masalah**

Mengacu pada uraian diatas, dimana fungsi BPD yang sangat strategis sebagai pengayom adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Diharapkan BPD mampu sebagai agen perubahan dalam rangka demokratisasi di desa, sebagai lembaga yang menjembatani masyarakat dengan pemerintah desa serta mampu mengontrol jalannya pemerintahan di tingkat desa.

Sebagai lembaga yang mempunyai kedudukan yang sama atau sejajar dengan Kepala Desa, ia dapat menjadi mitra kerja dalam pelaksanaan pemerintahan desa, tidak ada pihak yang dapat menjatuhkan antara BPD dengan Kepala Desa. Mereka harus mampu memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan warga desa yang bersangkutan. Antara BPD dengan Pemerintah Desa diharapkan tidak seperti pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), antara pemerintah pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pusat pada masa Orde Baru, dimana posisi pemerintah lebih "tinggi" dibandingkan dengan DPR-nya, termasuk keputusan yang diambil sangat dipengaruhi oleh Pemerintah.

Adanya mitra yang sejajar antara Pemerintah Desa dengan BPD diharapkan menuju proses demokrasi yang akan lebih cepat berjalan di tingkat desa. Lembaga BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di desa memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan kebijakan dan arah pembangunan di desa. Sebagai lembaga yang mewakili masyarakat, setiap anggota BPD secara khusus dituntut memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai untuk melaksanakan tugas, wewenang dan hak yang dimilikinya agar dapat memainkan fungsi dan perannya. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, BPD masih mempunyai keleluasaan dan kesempatan untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

Harus diakui secara jujur, kenyataan menunjukkan bahwa fungsi dan peran BPD khususnya di Di Desa Bulurejo sebagaimana yang digariskan masih belum terlaksana secara optimal.

Dimana masyarakat masih belum puas dengan kinerja yang diperlihatkan BPD yang ada di Desa Bulurejo sorotan kritis terhadap berbagai permasalahan seiring dengan pelaksanaan fungsi BPD sebagai wakil masyarakat, pembuat peraturan desa dan pengawas pemerintah desa datang dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat terlihat pada proses pembuatan kebijakan yang dibuat oleh Kepala Desa beserta aparatnya, anggota BPD kadang-kadang tidak diikutsertakan atau bahkan tidak dilibatkan sama sekali dalam proses tersebut yang semestinya setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa harus sepengetahuan dan disetujui oleh BPD selaku wakil dari masyarakat. Kekuasaan yang dimiliki oleh Kepala Desa cenderung lebih kuat atau dominan dari BPD.

Permasalahan yang selama ini muncul tidak dapat dibiarkan, tetapi harus ada pemecahan dan perbaikan untuk semakin meningkatkan Kinerja BPD dalam ikut Menyelenggaraan Pemerintahan Desa dimasa mendatang. Bertolak dari permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan (*problem question*) penelitian sebagai berikut :

1. Sejauh mana Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Ikut Mengelenggarakan Pemerintahan Desa ?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap Badan Permusyawaratan Desa sebagai forum musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah terkait dengan aspirasi masyarakat di Desa ?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Ikut Mengelenggarakan Pemerintahan Desa ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Ikut Mengelenggarakan Pemerintahan Desa.
2. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap Badan Permusyawaratan Desa sebagai forum musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah terkait dengan aspirasi masyarakat di Desa.
3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Ikut mengelenggarakan Pemerintahan Desa.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara praktis

Untuk memberikan keterampilan secara teknis kepada penulis sehingga dapat mengembangkannya pada studi lebih lanjut, disamping untuk dapat membandingkan antara teori yang ada dengan kenyataan dilapangan. Sebagai referensi tambahan dan bahan bacaan bagi upaya penelitian sejenis terhadap pihak yang berkepentingan.

2. Secara teoritis

Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Desa Bulurejo dalam upaya semakin memantapkan fungsi dan peran BPD serta untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerjanya sebagai unsur Pemerintah Desa yang senantiasa membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkatnya.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam usaha mengumpulkan data atau bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan beberapa cara atau metode antara lain sebagai berikut :

### **A. Penelitian Kepustakaan**



Sebelum penulis melakukan penelitian lapangan, guna melakukan pengamatan dan penelitian dalam rangka mencari atau menghimpun data yang diperlukan, maka terlebih dahulu penulis melakukan penelitian/telaah kepustakaan, yakni dengan cara menelaah buku-buku literatur dan bahan-bahan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Sehingga dengan adanya buku-buku tersebut merupakan garis petunjuk yang perlu untuk mencapai sasaran yang dikehendaki, selain itu juga ada hubungannya Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bulurejo, sehingga dapat dijadikan bahan atau data untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci.

## **B. Penelitian lapangan**

Yaitu dengan melakukan penelitian ini penulis langsung terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data/informasi yang relevan dengan topik masalah yang akan dibahas dalam penulisan Skripsi ini.

Kemudian untuk menunjang dalam penelitian lapangan ini penulis melakukan melalui :

### **1. Pendekatan Penelitian**

25

Pendekatan penelitian merupakan strategi yang dipilih penulis dalam mengamati dan mengumpulkan data, dan analisa data, dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara mengamati dan mendalami terhadap fenomena atau gejala-gejala yang diteliti.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah desain evaluatif dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan metode kualitatif diharapkan diperoleh data tentang gambaran, fenomena, fakta serta hubungan fenomena tertentu sebagaimana adanya secara komprehensif untuk mencapai tujuan penelitian. Metode kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati”. Dimana menurut Meleong (2009:3) bahwa dalam penelitian ini yang dikaji adalah fungsi dan peran BPD yang meliputi fungsi perwakilan, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan.

### 3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian Deskriptif, yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, dimana peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. Dimana menurut Masri Singarimbun(2009:4) dimana penelitian disini tidak menjelaskan hubungan kausal antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.

Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menggambarkan sejauhmana kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bulurejo secara sistematis dan tepat dengan pendekatan metodologi ilmiah. Sehingga bukan semata-mata diterapkan di desa yang bersangkutan tetapi juga untuk desa-desa yang lain.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut :

a). Observasi (pengamatan)

Yaitu dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti secara akurat terhadap fenomena yang sesuai dengan pokok permasalahan dalam Skripsi ini.

b). Interview (wawancara)

Yaitu dengan teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung kepada informan yang menjadi sasaran penelitian guna memperoleh data atau informasi yang faktual untuk dapat dijadikan bahan dalam penulisan Skripsi ini.

Kemudian data sekunder berupa data tertulis yang bersumber dari buku, dokumen, profil Desa/Kecamatan.

5. Sumber data :

- 1).Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui informasi wawancara dan hasil-hasil yang diperoleh dari pengisian oleh responden, dalam hal ini adalah warga di Desa Bulurejo yang terhimpun ke dalam wadah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- 2). Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumentasi dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi, dalam hal ini adalah buku-buku dari Desa Bulurejo Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu.

6. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penulisan Skripsi ini penulis lakukan di Desa Bulurejo Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu terhadap Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

7. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 17 orang. Dengan perincian Kepala BPD sebanyak 1 orang, Anggota BPD 5 orang, tokoh dan Masyarakat Desa sebanyak 5 orang, aparat Desa sebanyak 5 orang, dan Kepala Desa sebanyak 1 orang.

b. Sampel

Dengan mempertimbangkan keragaman populasi maka penulis mencoba menggunakan” Sampling Jenuh “ artinya mengambil keseluruhan dari jumlah populasi untuk dijadikan sampel.

Adapun teknik sampling yang digunakan adalah probability sampling berdasarkan Area (cluster) sampling sebanyak satu desa, dengan perincian sample yang akan diteliti sebagai berikut:

1) Kepala BPD	= 1 orang
2) Kepala Desa	= 1 orang
3) Anggota BPD	= 5 orang
4) Aparat Desa	= 5 orang
5) Tokoh Masyarakat Desa	= 5 orang
Jumlah	<hr/> = 17 orang

Dengan demikian maka populasi yang dijadikan sampel berjumlah 17 (tujuh belas) orang. Mereka yang dijadikan sampel itu sebagai responden sekaligus sebagai informan, yang dapat memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini dan dianggap mengetahui informasi tentang pelaksanaan fungsi dan peran BPD di Desa Bulurejo Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu.

8. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam pengolahan data pada penelitian ini adalah melalui :

Analisis data, dalam rangka memahami hasil data yang dikumpulkan, maka untuk menganalisis datanya digunakan analisis statistika sederhana yaitu menggunakan tabel frekuensi, dengan rumus:

$$\text{Rumus: } p = \frac{f}{n} \times 100$$

Keterangan:

p = persen

f = frekuensi

n = jumlah sampel

Kemudian dari analisis statistik tersebut diatas, diinterpretasikan atau ditafsirkan sesuai dengan teori-teori yang dikuasai oleh peneliti.

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

Arikunto Suharsini, 2009, *Prosedur Penelitian*, Renika Cipta, Jakarta.

Arifin, M.Tatang, 2007, *Menyusun Rencana Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Rajawali Jakarta

Dwiyanto, Agus, 2005, *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*, Fisipol UGM, Yogyakarta.

Darminta, Porwa, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Dunn, N. William, 2000, *Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Etzioni, Amitai, 2002, *Organisasi-Organisasi Modern*, Terjemahan Suryatin, UI Press, Jakarta.

Hidayat dan Sucherly, 2006, *Peningkatan Produktivitas Organisasi Pemerintahan dan Pegawai Negeri : Kasus Indonesia*, Penerbit Prisma Nomor 12 LP3ES, Jakarta.

Handoko, T. Hani, 2002, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta.

-----, 1992, *Manajemen Edisi II*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.

Kaho, Josep Riwu, 2008, *Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

Kartasasmita, Ginanjar, 2006, *Pembangunan Untuk Rakyat*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta.

Kartaprawira, Rusadi, 2000, *Pendekatan Sistem Dalam Ilmu-Ilmu Sosial, Aplikasi Dalam Meninjau Kehidupan Politik Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Keban, Yeremias, 2005, *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Kebiasaan*, Makalah, Fisip UGM, Yogyakarta.

Meleong, Lexy J, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Ndraha, Taliziduhu, 2000. *Hubungan Legislatif Dengan Eksekutif di Daerah*, IIP Press, Jakarta.

Osborne, David, dan Ted Gaebler, 2<sup>78</sup> *wirusahaakan Birokrasi*, Seri Manajemen Nomor 17, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.

Pamudji, S, 2005, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Rasyid Ryaas, Muhammad, 2002. *Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.

Sanit, Arbi, 2005, *Perwakilan Politik di Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 2009. *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.

Sujamto, 2005. *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sentono, Prawiro Suyadi, 2009. *Kebijakan Kinerja Karyawan*, BPFE Yogyakarta.

Undang-Undang Otonomi Daerah, 2009. Nomor 22 Tahun 2009, Tentang *Pemerintahan Daerah*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Widjaja, AW, *Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan UU No.06 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Suatu Telaah Administrasi negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.